



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretaris.....

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah;
 - d. Bidang Bina Hukum Islam;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Ibadah;
 - b. Seksi Pengembangan Wawasan Keagamaan; dan
 - c. Seksi Dakwah dan Syiar Islam.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang Bina Hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Perundang-Undangan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Islam;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam; dan
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Syari'at Islam adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh dibidang Syari'at Islam yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Dinas Syari'at Islam

Pasal 5

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, Bina Peribadatan dan Dakwah serta Bina Hukum Islam.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syari'at Islam mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Syari'at Islam;
- b. pelaksanaan tugas dibidang bina peribadatan dan dakwah serta bina hukum islam;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Syari'at Islam;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Syari'at Islam sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

a. melakukan.....

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Syari'at Islam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam ;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah

Pasal 10

Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Bimbingan Ibadah, Pengembangan Wawasan Keagamaan, Dakwah dan Syiar Islam.

Pasal 11.....

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang bimbingan ibadah, pengembangan wawasan keagamaan, dakwah dan syiar Islam;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang bimbingan ibadah, pengembangan wawasan keagamaan, dakwah dan syiar Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang bimbingan ibadah, pengembangan wawasan keagamaan, dakwah dan syiar Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang bimbingan ibadah, pengembangan wawasan keagamaan, dakwah dan syiar Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bimbingan ibadah, pengembangan wawasan keagamaan, dakwah dan syiar Islam sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Bimbingan Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang bimbingan ibadah;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang bimbingan ibadah;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang bimbingan ibadah;
- d. melaksanakan tugas dibidang bimbingan ibadah sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang bimbingan ibadah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang bimbingan ibadah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Pengembangan Wawasan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan wawasan keagamaan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan wawasan keagamaan;
- c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan wawasan keagamaan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan wawasan keagamaan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan wawasan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan wawasan keagamaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Dakwah Dan Syiar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang dakwah dan syiar Islam;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang dakwah dan syiar Islam;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang dakwah dan syiar Islam;
 - d. melaksanakan tugas dibidang dakwah dan syiar Islam sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang dakwah dan syiar Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang dakwah dan syiar Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Bina Hukum Islam

Pasal 13

Bidang Bina Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum islam, bimbingan dan penyuluhan hukum islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Hukum Islam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan hukum Islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan hukum Islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan hukum Islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan hukum Islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan hukum Islam, kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perundang-Undangan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam;
 - d. melaksanakan tugas dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam;
 - d. melaksanakan tugas dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang bimbingan dan penyuluhan hukum Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum;
 - d. melaksanakan tugas dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16.....

Pasal 16

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Dinas Syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syari'at Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syari'at Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 25.....

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syari'at Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 1 dan ketentuan Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

PIt.BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

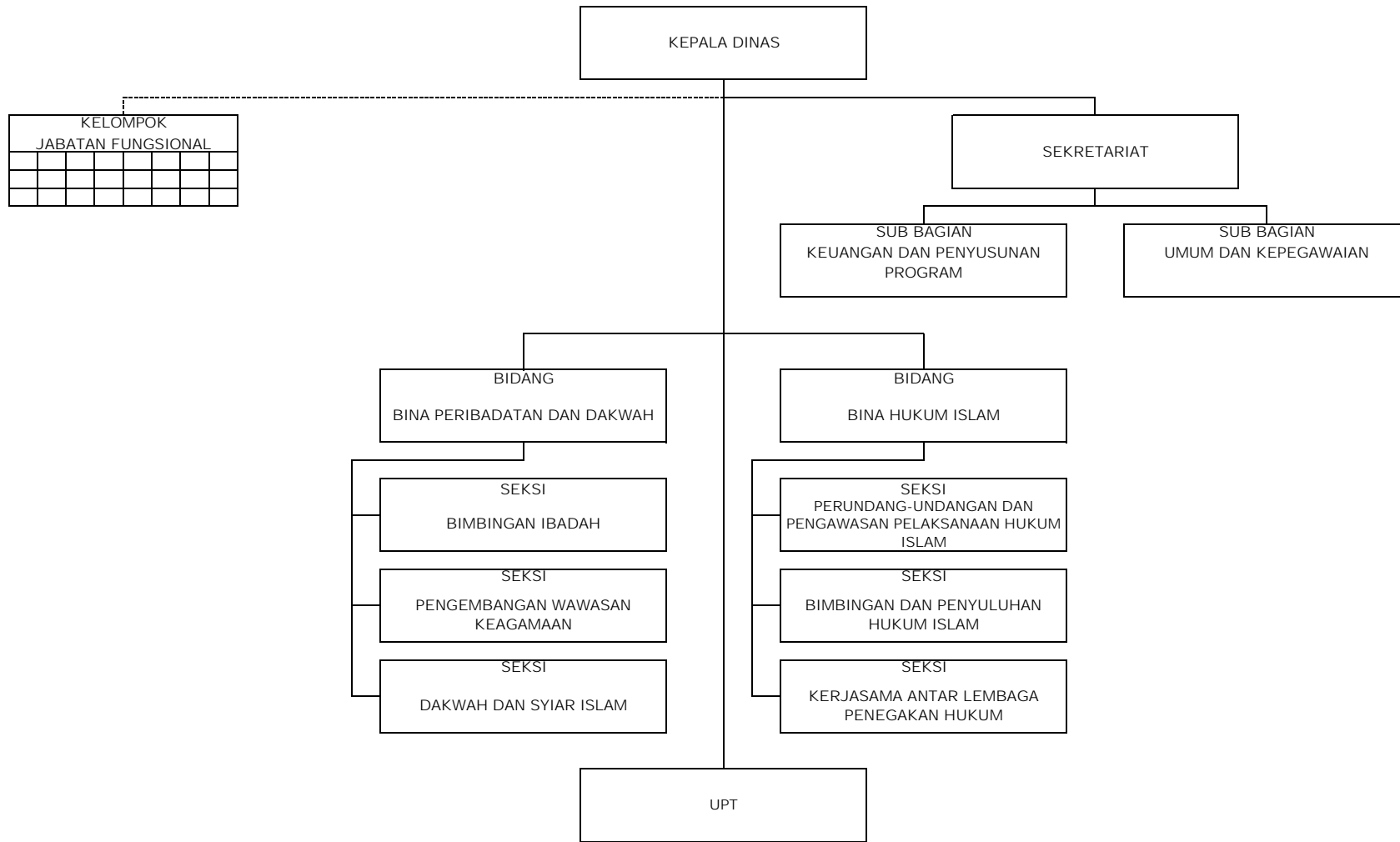
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 23



Keterangan :
 _____ : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,
 dto
 MUHAMMAD JAMIL